

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah.

PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari : Neraca Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca Daerah merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) Pemerintah Daerah/SKPD pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan dimaksudkan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan APBD 2014.

Tujuan dari pelaporan keuangan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Manajemen

Menyediakan informasi keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset dan ekuitas dana dan kegiatan.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi.

Laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- (1) Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Neraca
- (3) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- (a) Kas dan setara kas
- (b) Persediaan
- (c) Asset
- (d) Ekuitas dana

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- b) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan neraca.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 99) menyebutkan bahwa :

- a. Kepala SKPD/Kepala Dinas selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya;

- b. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelola;
- c. Laporan keuangan sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- d. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;
- e) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
- f) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampainya;
- l) Peraturan Gubernur Jawa Tengah **No. 58 Tahun 2013** Tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
- Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab 4 Kebijakan Akuntansi**
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD
- Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca
 5.1.1. Aset
 5.1.2. Kewajiban
 5.1.3. Ekuitas Dana
5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
 5.2.1. Pendapatan
 5.2.2. Belanja
- Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**
- Bab 7 Penutup**
- Lampiran Tambahan**

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD DINAS PENDIDIKAN ROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Ekonomi Makro

Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2014 memiliki anggaran belanja diluar bantuan sebesar Rp 308.487.264.000,- (tiga ratus delapan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 289.017.117.642,- atau sebesar 93,98 %. Realisasi anggaran tersebut secara ekonomis juga berdampak pada kegiatan dan usaha di masyarakat sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada ekonomi makro Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada peraturan-peraturan keuangan yang berlaku. Mulai pada tahun 2009 untuk penyamaan persepsi pengelolaan keuangan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Internal khusus untuk lingkungan Dinas Pendidikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Disamping sebagai petunjuk teknis juga memuat kesepakatan-kesepakatan intern yang meliputi antara lain batas akhir penyerahan SPP, SPJ oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada PPK, cara dan prosentase pemungutan pajak dan lain-lain yang merupakan rangkuman dari pelaksanaan Bimtek Penatausahaan Keuangan dan hasil telaah/ringkasan Peraturan Gubernur nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan dengan Nomor 903/02524.

Kebijakan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan rentang kendali dan beban tugas/kegiatan yang begitu besar/banyak maka Pengguna Anggaran menunjuk Eselon III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Eselon IV sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Setiap Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai satu Bendahara Pembantu Pengeluaran.

Sesuai dengan Pergub 58 dimana PPK SKPD dapat dijabat oleh Kasubag Keuangan Dinas/Badan dan lembaga daerah lainnya, maka Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan. Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai fungsi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi yang dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh staf pada Sub Bagian Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2014

Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yaitu terdiri dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (eselon III) sejumlah 8 orang, Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah 8 orang, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah 18 orang.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.

- 3.1.1. Pendapatan dapat melampaui target yang direncanakan yaitu realisasi pendapatan tahun 2014 sebesar Rp 638.024.000,- atau sebesar 100.01 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 621.444.000,-
- 3.1.2. Daya serap anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 289.017.117.642,- atau 93,98 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 308.487.264.000,-.
- 3.1.3. Laporan bulanan, triwulanan dan laporan akhir tahun dapat disusun dan disampaikan secara tepat waktu.
- 3.1.4. Semua Kegiatan dapat diselesaikan s/d 100 % dengan tidak ada kegiatan yang diluncurkan tahun berikutnya atau belum selesai.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan

Secara umum tidak ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan di SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat dalam daftar sbb:

**IIKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FISIK (%)	KEU (%)	Keterangan (tdk Terserapnya Anggaran <96%
1	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Pendidikan	142.030.000	142.030.000	100,00	100,00	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	21.600.000	21.600.000	100,00	100,00	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Pendidikan	1.605.600.000	1.501.156.542	100,00	93,50	efisiensi
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	672.000.000	622.228.551	100,00	92,59	efisiensi
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	400.000.000	349.207.638	100,00	87,30	efisiensi
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	516.000.000	359.278.781	100,00	69,63	efisiensi

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2014

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

1	3	4	5	6	7	8
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas Pendidikan	282.233.000	227.192.000	100,00	80,50	efisiensi
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00	
11	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Pendidikan	375.186.000	368.032.200	100,00	98,09	
12	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	501.715.000	501.011.500	100,00	99,86	
13	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	24.500.000	24.500.000	100,00	100,00	
14	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	75.000.000	75.000.000	100,00	100,00	
15	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	127.200.000	127.200.000	100,00	100,00	
16	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Pendidikan	613.275.000	612.793.000	100,00	99,92	
17	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	31.500.000	31.500.000	100,00	100,00	
18	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00	
19	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	60.000.000	60.000.000	100,00	100,00	
20	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	198.691.000	198.381.000	100,00	99,84	
21	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	36.000.000	36.000.000	100,00	100,00	
22	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	
23	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	40.800.000	40.725.000	100,00	99,82	
24	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	435.000.000	435.000.000	100,00	100,00	
25	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00	
26	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Pendidikan	420.216.000	411.402.000	100,00	97,90	
27	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	33.000.000	33.000.000	100,00	100,00	
28	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	90.000.000	90.000.000	100,00	100,00	
29	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	51.600.000	51.600.000	100,00	100,00	
30	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Pendidikan	270.319.000	268.039.000	100,00	99,16	
31	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	
32	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	36.000.000	36.000.000	100,00	100,00	

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

1	3	4	5	6	7	8
33	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	20.400.000	19.860.000	100,00	97,35	
34	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Pendidikan	920.063.000	920.063.000	100,00	100,00	
35	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	
36	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	
37	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	42.720.000	42.720.000	100,00	100,00	
38	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Pendidikan	1.431.800.000	1.241.122.228	100,00	86,68	efisiensi
39	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	61.200.000	61.200.000	100,00	100,00	
40	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Pendidikan	5.026.911.000	4.968.198.079	100,00	98,83	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
41	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Pendidikan	738.000.000	671.325.000	100,00	90,97	efisiensi
42	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Pendidikan	188.996.000	186.440.000	100,00	98,65	
43	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	922.911.000	896.486.000	100,00	97,14	
44	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	900.000.000	899.950.000	100,00	99,99	
45	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	1.100.000.000	1.093.817.000	100,00	99,44	
46	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	1.076.000.000	1.068.340.000	100,00	99,29	
47	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Pendidikan	398.580.000	397.356.000	100,00	99,69	
48	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	
49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	27.415.000	27.415.000	100,00	100,00	
50	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	662.000.000	661.836.000	100,00	99,98	
51	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	171.300.000	171.300.000	100,00	100,00	
52	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	276.900.000	276.900.000	100,00	100,00	
53	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	294.154.000	293.093.000	100,00	99,64	
54	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	438.450.000	430.583.000	100,00	98,21	
55	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	228.000.000	228.000.000	100,00	100,00	

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

1	3	4	5	6	7	8
56	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	273.445.000	272.585.000	100,00	99,69	
57	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	279.000.000	272.825.000	100,00	97,79	
58	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Pendidikan	157.500.000	157.500.000	100,00	100,00	
59	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Sekretariat Dinas Pendidikan	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	
60	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	650.000.000	650.000.000	100,00	100,00	
61	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	3.530.000.000	3.398.265.000	100,00	96,27	
62	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	3.202.243.000	2.911.141.500	100,00	90,91	efisiensi
63	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	2.700.000.000	2.636.088.750	100,00	97,63	
64	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	3.681.641.000	3.567.112.150	100,00	96,89	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
65	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Sekretariat Dinas Pendidikan	985.923.000	937.029.000	100,00	95,04	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
66	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	1.000.000.000	992.027.000	100,00	99,20	
67	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	635.916.000	575.191.625	100,00	90,45	Efisiensi
68	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	771.987.000	751.793.000	100,00	97,38	
69	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	2.143.454.000	2.120.904.575	100,00	98,95	
70	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebendarawanan	373.500.000	348.996.250	100,00	93,44	efisiensi
	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI					
71	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan	4.450.890.000	4.433.460.000	100,00	99,61	
72	Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras)	2.290.000.000	2.281.550.000	100,00	99,63	
73	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kurikulum	1.450.000.000	1.443.717.400	100,00	99,57	
74	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan	1.184.760.000	1.181.934.000	100,00	99,76	
	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR					
75	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan	6.800.000.000	6.569.942.000	100,00	96,62	

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

1	3	4	5	6	7	8
76	Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana	700.000.000	654.108.000	100,00	93,44	efisiensi
77	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kurikulum	3.300.000.000	3.201.527.000	100,00	97,02	
78	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan	17.693.150.00 0	15.987.663.75 0	100,00	90,36	efisiensi
79	Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar DIKDAS	2.000.000.000	1.971.676.100	100,00	98,58	
	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH					
80	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan	3.775.000.000	3.559.604.000	100,00	94,29	efisiensi
81	Kegiatan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras)	1.666.835.000	1.627.518.000	100,00	97,64	
82	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kurikulum	2.630.690.000	2.389.199.500	100,00	90,82	efisiensi
83	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan	19.500.000.00 0	17.310.984.80 0	100,00	88,77	efisiensi
84	Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Menengah	1.600.000.000	1.583.500.975	100,00	98,97	
	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL					
85	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan	2.842.900.000	2.834.498.000	100,00	99,70	
86	Kegiatan Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat	2.727.555.000	2.720.270.000	100,00	99,73	
87	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kurikulum PNF	730.050.000	728.430.000	100,00	99,78	
88	Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Non Formal (PNF)	1.250.000.000	1.232.768.360	100,00	98,62	
	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS					
89	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan	6.153.140.000	5.964.251.525	100,00	96,93	
90	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaaan	2.000.000.000	1.992.088.625	100,00	99,60	
91	Kegiatan Koordinasi pengembangan kurikulum	2.800.960.000	2.765.259.000	100,00	98,73	
92	Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Khusus	1.500.000.000	1.471.956.000	100,00	98,13	
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
93	Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Diktendik Formal dan Non Formal	7.000.000.000	6.844.393.750	100,00	97,78	
94	Kegiatan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal	1.560.000.000	1.555.136.500	100,00	99,69	
95	Kegiatan Harlindung Diktendik dan Kesra Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal	8.300.000.000	7.859.479.500	100,00	94,69	efisiensi
96	Kegiatan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal	2.500.000.000	2.468.695.750	100,00	98,75	

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

1	3	4	5	6	7	8
97	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Unit Pelaksana Tenis BP-Dikjur	11.398.366.000	10.813.941.680	100,00	94,87	efisiensi
98	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Unit Pelaksana Teknis BP-TIKP	3.000.000.000	2.988.919.300	100,00	99,63	
99	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Unit Pelaksana Teknis BP-DIKSUS	1.330.000.000	1.318.550.050	100,00	99,14	
	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN					
100	Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan	2.532.300.000	1.835.600.475	100,00	72,49	efisiensi
101	Kegiatan Penguatan Perencanaan Pendidikan	1.949.506.000	1.723.496.275	100,00	88,41	efisiensi
102	Kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik	9.370.566.000	7.780.836.125	100,00	83,03	efisiensi
103	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Bidang Pendidikan	1.852.469.000	1.162.636.516	100,00	62,76	efisiensi
104	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan UASBN, UN dan UNPK	4.997.750.000	4.563.912.525	100,00	91,32	efisiensi
105	Kegiatan Akreditasi Sekolah / Madrasah	3.942.345.000	3.845.555.400	100,00	97,54	
	PROGRAM FASILITASI PENDIDIKAN TINGGI					
106	Kegiatan Koordinasi Potensi Akademi Mahasiswa	468.588.000	465.987.500	100,00	99,45	
107	Kegiatan Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di desa vokasi	600.000.000	598.340.000	100,00	99,72	
108	Kegiatan Pembinaan Peningkatan Potensi Mahasiswa	1.394.400.000	1.391.496.000	100,00	99,79	
109	Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Pendidikan Tinggi	5.000.000.000	4.981.359.000	100,00	99,63	
110	Kegiatan Pembinaan Potensi Olahraga dan Seni Mahasiswa	250.000.000	250.000.000	100,00	100,00	
	PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN					
111	Kegiatan Koordinasi Pendidikan Untuk Semua	654.980.000	585.142.375	100,00	89,34	efisiensi
112	Kegiatan Pembinaan Nasionalisme Pendidikan	4.260.328.000	3.883.061.025	100,00	91,14	efisiensi
113	Kegiatan Koordinasi Publikasi Kinerja Pendidikan	1.000.000.000	969.619.000	100,00	96,96	
114	Kegiatan Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan	1.161.650.000	909.650.125	100,00	78,31	efisiensi
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					
115	Kegiatan Pengembangan model pencegahan kekerasan berbasis gender di sekolah	250.000.000	250.000.000	100,00	100,00	
116	Kegiatan Pengembangan model Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG)	250.000.000	250.000.000	100,00	100,00	
	JUMLAH	207.066.052.000	194.599.056.275	100,00	93,98	

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Akuntansi mengikuti peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan akuntansi yang dibuat oleh Entitas Laporan yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sejak dibangunnya Sistem Aplikasi/SIPKD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai dinas yang mempunyai kegiatan terbanyak dan anggaran yang besar ditunjuk sebagai Piloting Sistem Aplikasi/SIPKD dimaksud dan sejak Tahun 2011, 2012 dan 2013 telah menggunakan Sistem Aplikasi/SIPKD secara penuh.

Proses Penatausahaan dan Pelaporan pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 sudah dapat menyajikan Laporan Keuangan melalui Aplikasi/SIPKD.

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi sebagai dasar pelaksanaan pada tahun anggaran 2014 adalah menggunakan Basis Kas Menuju Akruwal, dimana pengakuan belanja, pendapatan dan pembiayaan berbasis kas sedangkan aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruwal.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran yang mendasari laporan keuangan SKPD yaitu pengukuran waktu menggunakan/sesuai dengan periode tahun anggaran dan untuk pengukuran harga menggunakan harga terakhir.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan yang ada dalam SAP SKPD

4.4.1. Penambahan aset secara terencana, menggunakan Rekening Belanja Modal.

4.4.2. Biaya perolehan aset menambah nilai aset

4.4.3. Seluruh rencana pengadaan Barang yang menjadi aset sudah dialokasikan dengan biaya perolehan yang tersusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos –Pos Neraca**5.1.1. Aset Lancar****5.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor**

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan merupakan bagian dari SILPA Tahun 2014 baik tunai maupun simpanan yang ada di rekening bank (termasuk jasa gironya).

NO	Uraian	2014	2013
1	Tunai	0	44.257.500
2	Bank	0	0
	Jumlah	0	44.257.500

5.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa)

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) adalah saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2014 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2014.

NO	Uraian	2014	2013
1	Tunai	0	0
2	Bank	0	0
	Jumlah	0	0

5.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2014.

NO	URAIAN	2014	2013
1	Tunai	0	0
	Jumlah	0	0

5.1.1.4. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah pendapatan pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2014 belum dibayar oleh wajib pajak (**disertai penjelasan yang spesifik**).

NO	URAIAN	2014	2013
1		0	0
2		0	0
	Jumlah	0	0

5.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2014, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

5.1.1.5.1. Persediaan Bahan Pakai Habis

NO	JENIS BARANG	Jumlah Barang	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
1	Amplop putih kecil	30 dos	8.000	240.000	
2	Amplop putih sedang	65 dos	18.000	1.170.000	
3	Amplop putih panjang	85 dos	20.000	1.700.000	
4	Tali rafia	47 gulung	25.000	1.175.000	
5	Bantalan stempel	20 buah	35.000	700.000	
6	Stopmap plastik	350 buah	17.000	5.950.000	
7	Stopmap folio	300 buah	3.000	900.000	
8	Buku Ekspedisi	65 buah	20.000	1.300.000	
9	Buku folio isi 200	11 buah	40.000	440.000	
10	Buku kwarto isi 100	5 buah	15.000	75.000	
11	Buku kwitansi	160 buah	9.700	1.552.000	
12	Buku agenda isi 400	25 buah	76.000	1.900.000	
13	Binder klip 25mm	8 dos	15.000	120.000	
14	Binder klip 32mm	8 dos	20.000	160.000	
15	Binder klip 51mm	20 dos	30.000	600.000	
16	Batu ABC AAA Alkaline	48 buah	5.500	264.000	
17	Batu ABC AA Alkaline	30 buah	6.600	198.000	
18	Batu ABC besar	30 buah	6.000	180.000	
19	Batu ABC kotak	100 buah	27.000	2.700.000	
20	Hechmachine kecil	26 buah	55.000	1.430.000	
21	Hechmachine besar	17 buah	95.000	1.615.000	
22	Isi hechmachine kecil	305 pak	17.500	5.337.500	
23	Isi hechmachine besar	110 pak	30.000	3.300.000	
24	Karet gelang	- kg	55.000	-	
25	Kertas HVS folio 70 gram	245 rim	40.000	9.800.000	
26	Kertas HVS folio 80 gram	15 rim	43.000	645.000	
27	Kertas HVS kwarto 80 gram	10 rim	43.000	430.000	
28	Lem stik 40 gram	45 buah	40.000	1.800.000	
29	Ordner	38 buah	30.000	1.140.000	
30	Penghapus cair / tip X	31 buah	41.000	1.271.000	
31	Pensil steadler 2B	110 buah	4.000	440.000	
32	Removable self (post it)	4 box	140.000	560.000	
33	Paper clip	85 pak	31.000	2.635.000	
34	Bolpoin faster	38 dos	33.000	1.254.000	
35	Bolpoin gel 0,7	5 dos	65.000	325.000	
36	Bolpoin gel 0,5	10 dos	52.000	520.000	
37	Bolpoin pen TG	10 dos	80.000	800.000	

38	Spidol whiteboard	4	dos	110.000	440.000	
39	Stabilo	7	dos	150.000	1.050.000	
40	Snelhecter plastik	250	buah	20.000	5.000.000	
41	Tinta stempel	47	botal	40.000	1.880.000	
42	Box file (karton) FC 10cm	50	buah	32.000	1.600.000	
43	DVD blank	10	pak	295.000	2.950.000	
44	Penggaris Mika	-	buah	3.000	-	
45	Gunting FL 8,5"	31	buah	17.000	527.000	
46	Isolasi kecil bening	30	buah	4.000	120.000	
47	Lakban 2"	20	buah	20.000	400.000	
48	Lem kental besar	18	buah	19.000	342.000	
49	Penggaris besi	20	buah	8.500	170.000	
50	Penghapus karet (setip)	200	buah	4.000	800.000	
51	Pervorator kecil	12	buah	65.000	780.000	
52	Pervorator besar	20	buah	95.000	1.900.000	
53	Buku Folio isi 100	-	buah	18.525	-	
54	Tinta photocopy SHARP AR 5520	3	buah	1.900.000	5.700.000	
55	Isi pisau caerter 2 cm	-	buah	20.400	-	
56	HP toner laserjet 35A	14	buah	1.100.000	15.400.000	
57	HP toner laserjet 80A	15	buah	1.600.000	24.000.000	
58	HP toner laserjet 85A	15	buah	1.100.000	16.500.000	
	Jumlah				134.185.500	

5.1.1.5.2. Persediaan Bahan Pakai Habis BP TIKP

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KET
1	Isi steples besar 1 pcs	10	4.200	42.000	
2	Isi steples kecil@10 pcs	10	4.200	42.000	
3	Gunting besar	1	8.800	8.800	
4	Amplop putih sedang	5	10.000	50.000	
5	Spidol besar snowman 1 pcs	1	79.950	79.950	
6	Kertas HVS A 4 70 gram	1	37.000	37.000	
7	Kertas HVS F4 70 gram	2	42.000	84.000	
8	Isolasi bening 12 mm	5	6.600	33.000	
9	Stop map kertas	100	1.400	140.000	
10	Cutter L-150	2	12.100	24.200	
	JUMLAH			540.950	

5.1.1.5.3. Persediaan Bahan Pakai Habis BP Dikjur

NO	NAMA BARANG	SISA	SATUAN	HARGA SAT	TOTAL
1	Amplop Besar	7	Pak	17.500	122.500
2	Amplop Kecil	0	Pak	7.500	
3	Amplop Coklat	1	Pak	75.000	75.000
4	Amplop Kop	1	Pak	35.000	35.000
5	Bantalan stampel	2	Pcs	15.000	30.000
6	Batu A	4	Pcs	15.000	60.000
7	Batu AA	6	Pcs	8.000	48.000
8	Batu AAA	8	Pcs	8.000	64.000
9	Binder	2	Pak	25.000	50.000
10	Blok Note	2	Pcs	4.600	9.200
11	Board Maker	4	Dos	90.000	360.000
12	Bok Fail	9	Pcs	20.000	180.000
13	Bolpoin	5	Dos	20.000	100.000
14	Buku Besar Isi 50	10	Buku	12.500	125.000
15	Buku Besar Isi 100	1	Buku	25.000	25.000
16	Buku Besar Isi 200	3	Buku	50.000	150.000
17	Buffallo Cover	2	Pak	45.000	90.000
18	Buku Memo	10	Buku	2.500	25.000
19	Cater Kecil	0	Dos	60.000	-
20	CD Blank	1	Dos	150.000	150.000
21	Dispenser Tape	3	Pcs	30.000	90.000
22	Dvd Blank	1	Box	150.000	150.000
23	Fail Plastik	1	Pcs	7.500	7.500
24	Gunting	3	Pcs	25.000	75.000
25	HVS A4 80 gr	4	Rim	52.000	208.000
26	HVS A4 70 gr	8	Rim	45.000	360.000
27	HVS F4 70 gr	8	Rim	45.000	360.000
28	Isi Staples Besar	4	Pak	4.000	16.000
29	Isi Staples Kecil	3	Pak	2.500	7.500
30	Isi Pentel	1	Dos	150.000	150.000
31	Kater Besar	1	Dos	90.000	90.000
32	Kertas Warna	9	Rim	50.000	450.000
33	Kwitansi	9	Pcs	7.500	67.500
34	Kertas Fax	10	Pcs	17.500	175.000
35	Lakban Hitam	4	Gulung	20.000	80.000
36	Lakban Putih	12	Gulung	25.000	300.000
37	Lim Kertas	2	Dos	36.000	72.000
38	Mika Plastik	1	Pak	45.000	45.000
39	Otchner	1	Pcs	17.500	17.500
40	Paper Clip Besar	3	Dos	50.000	150.000
41	Paper Clip Kecil	3	Dos	25.000	75.000
42	Pencil	2	Dos	40.000	80.000
43	Penggaris Besar	2	Pcs	6.000	12.000
44	Penggaris Kecil	1	Pcs	1.000	1.000
45	Penghapus Whiteboard	3	Pcs	10.000	30.000
46	Pita ketik	8	Gulung	20.000	160.000

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

47	Pentel	2	Pcs	50.000	100.000
48	Serutan	4	Pcs	22.500	90.000
49	Snelhecter Kertas	12	Pcs	2.000	24.000
50	Snelhecter Plastik	1	Pcs	7.500	7.500
51	Stabilo	1	Dos	120.000	120.000
52	Steples Besar	1	Pcs	75.000	75.000
53	Steples Kecil	1	Dos	15.000	15.000
54	Stip	2	Pak	60.000	120.000
55	Stopmap kertas	1	Pcs	1.000	1.000
56	Stopmap Plastik	2	Pcs	7.500	15.000
57	Stopmap Kop	100	Exsplr	5.000	500.000
58	Tinta Stampel	10	Botol	10.000	100.000
59	Tipe x	2	Pcs	15.000	30.000
60	Tinta Dat Print	3	Pcs	35.000	105.000
61	Toner 12 A	0	Pcs	950.000	-
62	Toner 35 A	0	Pcs	950.000	-
63	Toner 36 A	0	Pcs	950.000	-
64	Vertorator	1	Pcs	120.000	120.000
	TOTAL				6.350.200

5.1.1.5.4. Persediaan Bahan Pakai Habis BP Dikus

NO	NAMA BARANG	SISA	SATUAN	HARGA SAT	TOTAL
1	Stopmap kertas	1	Pcs	1.000	1.000
2	Stopmap Plastik	2	Pcs	7.500	15.000
3	Stopmap Kop	25	Exsplr	5.000	125.000
4	Batu A	4	Pcs	15.000	60.000
5	Batu AA	6	Pcs	8.000	48.000
6	Batu AAA	8	Pcs	8.000	64.000
7	Binder	2	Pak	25.000	50.000
8	Blok Note	2	Pcs	4.600	9.200
8	Board Maker	5	Dos	90.000	450.000
9	Bok Fail	2	Pcs	20.000	40.000
10	Board Maker	4	Dos	90.000	360.000
11	Bok Fail	9	Pcs	20.000	180.000
12	Bolpoin	5	Dos	20.000	100.000
13	Buku Besar Isi 50	4	Buku	12.500	50.000
14	Buku Besar Isi 100	1	Buku	25.000	25.000
15	Buku Besar Isi 200	3	Buku	50.000	150.000
16	Buffallo Cover	2	Pak	45.000	90.000
17	HVS A4 80 gr	4	Rim	52.000	208.000
18	HVS A4 70 gr	8	Rim	45.000	360.000
19	HVS F4 70 gr	8	Rim	45.000	360.000
20	Isi Staples Besar	4	Pak	4.000	16.000
21	Isi Staples Kecil	3	Pak	2.500	7.500
22	Fail Plastik	1	Pcs	7.500	7.500
23	Gunting	3	Pcs	25.000	75.000
24	HVS A4 80 gr	4	Rim	52.000	208.000
25	HVS A4 70 gr	8	Rim	45.000	360.000

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

26	HVS F4 70 gr	8	Rim	45.000	360.000
27	Isi Staples Besar	4	Pak	4.000	16.000
28	Isi Staples Kecil	3	Pak	2.500	7.500
29	Isi Pentel	1	Dos	150.000	150.000
30	Kater Besar	1	Dos	90.000	90.000
31	Kertas Warna	4	Rim	50.000	200.000
32	Kwitansi	7	Pcs	7.500	52.500
33	Kertas Fax	4	Pcs	17.500	70.000
34	Lakban Hitam	4	Gulung	20.000	80.000
35	Lakban Putih	12	Gulung	25.000	300.000
36	Lim Kertas	2	Dos	36.000	72.000
37	Mika Plastik	1	Pak	45.000	45.000
38	Otchner	1	Pcs	17.500	17.500
39	Paper Clip Besar	3	Dos	50.000	150.000
40	Paper Clip Kecil	3	Dos	25.000	75.000
41	Snelhecter Kertas	8	Pcs	2.000	16.000
42	Snelhecter Plastik	1	Pcs	7.500	7.500
43	Snelhecter Kertas	12	Pcs	2.000	24.000
44	Snelhecter Plastik	1	Pcs	7.500	7.500
45	Pita ketik	2	Gulung	20.000	40.000
46	Pentel	2	Pcs	50.000	100.000
47	Serutan	4	Pcs	22.500	90.000
48	Snelhecter Kertas	6	Pcs	2.000	12.000
49	Snelhecter Plastik	1	Pcs	7.500	7.500
50	Stabilo	1	Dos	120.000	120.000
51	Steples Besar	1	Pcs	75.000	75.000
52	Steples Kecil	1	Dos	15.000	15.000
55	Stopmap Plastik	2	Pcs	7.500	15.000
56	Stopmap Kop	10	Exsplr	5.000	50.000
57	Tinta Stampel	3	Botol	10.000	30.000
58	Tipe x	2	Pcs	15.000	30.000
60	Lim Kertas	2	Dos	36.000	72.000
61	Mika Plastik	1	Pak	45.000	45.000
62	Otchner	1	Pcs	17.500	17.500
	TOTAL				5.878.700

5.1.2. Aset Tetap

No	Uraian	2014	2013
1	Tanah	104.450.682.852	104.450.682.852
2	Peralatan dan Mesin	80.843.002.057	70.504.209.842
3	Gedung dan Bangunan	109.923.909.545	108.580.646.545
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.718.424.422	1.544.558.422
5	Aset Tetap lainnya	4.207.935.477,46	4.104.250.477
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
	Jumlah	0	277.641.591.121

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Penambahan	2014
Koreksi dan Penilaian	0
Reklasifikasi Masuk	173.866.000
Hibah	55.100.000
Mutasi Masuk	0
Kapitalisasi non Belanja Modal	0
Belanja Modal	13.260.496.400
Jumlah	13.489.462.400
Pengurangan	2014
Koreksi	0
Reklasifikasi Keluar	1.326.134.963
Ekstrakontable	203.717.221
Hibah	0
Mutasi Keluar	0
Penghapusan	0
Jumlah	1.529.856.184

5.1.3. Aset Lainnya

Reklas keluar terdiri dari:

No	Uraian	2014	2013
1	Alat-alat bengkel	0	395.499.798
2	Alat kantor dan rumah tangga	710.348.364	966.685.545
3	Alat studio dan komunikasi	15.217.599	38.238.071
4	Alat laboratorium	0	2.205.000
5	Barang bercorak seni dan budaya	0	1.000.000
Jumlah		1.326.138.963	1.403.628.414

5.1.4. Ekuitas Dana

EKUITAS DANA LANCAR

No	Uraian	2014	2013
1	SILPA	270.144.573.650	261.652.978.066
2	Pendapatan yang ditangguhkan	0	
3	Cadangan Persediaan	146.414.400	143.746.850
	Jumlah	270.290.988.050	261.796.724.916

EKUITAS DANA INVESTASI

No	Uraian	2014	2013
1	Diinvestasikan dalam aset tetap	263.604.236.062,73	289.184.348.138
2	Diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	1.418.994.414	1.403.628.413

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

No	Uraian	2014	2013
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	621.400.000	809.103.807
2	Penerimaan Lain-Lain SKPD	16.580.000	0
	Jumlah	638.024.000	809.103.807

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013 di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pada TA 2014 mengalami penurunan dari realisasi pendapatan TA 2013.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya obyek retribusi kekayaan daerah karena perpindahan gedung kantor BP TIKP sebagai obyek retribusi, sehingga beberapa pengelolaan sarana prasarana gedung lama menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang.
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi karena obyek retribusinya berkurang.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada TA 2014, memperoleh Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya sebesar Rp 55.100.000.

5.2.2. Belanja

5.2.2.1. Belanja Pegawai

Merupakan belanja pegawai baik yang ada pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

No	Uraian	2014	2013
I.	Belanja Tidak Langsung	94.418.061.367	64.722.311.799
II.	Honorarium PNS	5.572.064.500	11.648.666.000
III.	Honorarium Non PNS	23.433.893.179	40.764.580.100
IV.	Uang Lembur	3.204.000	284.444.500
	JUMLAH	123.427.223.046	117.420.002.399

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada TA 2014 meliputi: Belanja Tidak Langsung, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan Uang Lembur.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 123.427.223,046 dan Rp 117.420.002,399. Berdasarkan Tabel di atas, realisasi belanja TA 2014 mengalami kenaikan dari realisasi belanja TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai baru.
2. Adanya kenaikan gaji secara nasional dan kenaikan gaji reguler.

5.2.2.2. Belanja Barang/Jasa

No	Uraian	2014	2013
1	Belanja Bahan Pakai Habis	16.684.686.325	18.791.007.200
2	Belanja Bahan/Material	3.100.558.500	4.121.117.500
3	Belanja Jasa Kantor	23.765.199.412	11.891.883.897
4	Belanja Premi Asuransi	390.458.200	280.024.850
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	436.239.000	477.438.200
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.869.385.050	8.378.381.350
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.539.602.775	26.467.614.000
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.786.532.000	1.737.958.600
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.180.868.000	1.845.626.000
10	Belanja Makanan dan Minuman	32.695.291.800	33.008.861.300
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	636.122.000	592.875.000
12	Belanja Pakaian Kerja	616.199.000	17.000.000
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.058.412.500	410.305.000
14	Belanja Perjalanan Dinas	16.300.280.634	16.736.753.670
15	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	276.450.000	245.039.000
16	Belanja Pemeliharaan	7.419.820.000	5.777.526.700
	JUMLAH	145.756.105.196	130.779.412.267

5.2.2.3. Belanja Modal

5.2.2.3.1. Belanja Modal Tanah

No	Uraian	2014	2013
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0
	JUMLAH	0	0

5.2.2.3.2. Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2014	2013
1	Alat-alat Berat	0	0
2	Alat-alat Angkut	671.325.000	182.132.000
3	Alat-alat Bengkel	1.480.481.000	192.825.000
4	Alat-alat Kantor	1.104.897.000	0
5	Perlengkapan Kantor	2.168.295.000	0
6	Pengadaan Komputer	2.235.794.250	0
7	Pengadaan Mebelair	2.265.984.650	0
8	Alat-alat Studio	1.103.898.500	0
9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	3.472.973.500
10	Alat-alat Komunikasi	200.300.000	674.234.900
	JUMLAH	11.230.975.400	4.522.165.400

5.2.2.3.3. Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2014	2013
1	Bangunan	1.499.129.000	8.829.148.000
		0	0
	JUMLAH	1.499.129.000	8.829.148.000

5.2.2.3.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	2014	2013
1	Jalan dan Jembatan	0	0
2	Bangunan air (Irigasi)	0	0
3	Instalasi dan Jaringan	0	0
	JUMLAH	0	0

5.2.2.3.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2014	2013
1	Buku Perpustakaan	103.685.000	102.250.000
2	Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	0	0
3	Hewan Ternak dan Tanaman	0	0
	JUMLAH	103.685.0000	102.250.000

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	2014	2013
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	621.400.000	809.103.807
2	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	16.580.000	0
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	55.100.000	0
	Jumlah	693.12024.000	809.103.807

5.3.2. Beban Operasional

No	Uraian	2014	2013
1	Beban pegawai	123.427.223.046	0
2	Beban Persediaan	66.657.446.675	0
3	Beban Jasa	54.369.638.887	0
4	Beban Pemeliharaan	7.856.059.000	0
5	Beban Perjalanan Dinas	16.300.280.634	0
6	Beban Penyusutan	11.003.170.874.63	0
7	Beban Penghapusan aset	1.432.396.549,17	0
8	Beban Lain-lain	7.276.450.000	0
	Jumlah	288.033.665.665,80	0

BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan perguruan tinggi serta pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- a. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, membawahkan:

- 2.1. Subbagian Program;
- 2.2. Subbagian Keuangan;
- 2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan;
 - 3.1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - 3.1 . Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;
 - 3.2 . Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 - 4.1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - 4.2. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;
 - 4.3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi, membawahkan:
 - 5.1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 - 5.2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 5.3. Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi.

6. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan:
 - 6.1. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - 6.2. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
 - 6.3. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal

7. UPTD;
 - 7.1. Balai Pengembangan Pendidikan Khusus
 - 7.2. Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan
 - 7.3. Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.
 1. **Sekretariat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 2. **Bidang-bidang** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 3. **Subbagian-subbagian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4. **Seksi-seksi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
5. **UPTD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2014. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 45 Tahun 2014** tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
Pembina Utama Muda
NIP. 19590522 198603 1 009



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pemuda134 Semarang 50132 Telp. (024) 3515301
Faximile 3520071**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, 31 Desember 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
Pembina Utama Muda
NIP. 19590522 198603 1 009

LAMPIRAN :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIPKD)
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIPKD)
3. Daftar Potensi Aset Tahun Anggaran 2014.
4. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2014.
5. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2014.
6. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2014.

DAFTAR ISI :

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3
BAB II	5
2.1. Ekonomi Makro	5
2.2. Kebijakan Keuangan.....	5
BAB III	7
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	7
1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.	7
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan	7
BAV IV	13
KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	13
4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	13
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD	13
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan yang ada dalam SAP SKPD	13
BAB V	14
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	14
5.1. Penjelasan Pos –Pos Neraca.....	14
5.1.1.1.Kas di Bendahara Pengeluaran.....	14
5.1.1.2.Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa).....	14
5.1.1.3.Kas di Bendahara Penerimaan.....	14
5.1.1.4.Piutang Pajak	14
5.1.1.5. Persediaan	14
5.1.2. Aset tetap	19
5.1.3. Ekuitas Dana	20
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
5.2.1.Pendapatan	21
5.2.2.Belanja	21
5.2.2.1.Belanja Pegawai	21
5.2.2.2.Belanja Barang/Jasa	22
5.2.2.3.Belanja Modal	22
5.2.2.3.1.Belanja Modal Tanah	22
5.2.2.3.2.Belanja Peralatan dan Mesin	22
5.2.2.3.3.Belanja Gedung dan Bangunan	23
5.2.2.3.4.Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	23
5.2.2.3.5.Belanja Aset Tetap Lainnya	23
BAB VI	24
INFORMASI NON KEUANGAN.....	24
BAB VII	27
PENUTUP	27
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	28
LAMPIRAN :	29

